



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 18 Februari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH DAERAH D.I. YOGYAKARTA
UNIT KERJA : DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL

I. DATA PRIBADI

1. Nama : ANNA RINA HERBRANTI
2. Jabatan : KEPALA DINAS
3. NHK : 107274

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 2.325.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 248 m2/205 m2 di KAB / KOTA SLEMAN, WARISAN Rp. 1.000.000.000
2. Tanah Seluas 100 m2 di KAB / KOTA SLEMAN, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 119 m2/48 m2 di KAB / KOTA SEMARANG, HASIL SENDIRI Rp. 425.000.000
4. Bangunan Seluas 30 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN , HASIL SENDIRI Rp. 800.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 926.600.000

1. MOTOR, HONDA ASTREA SEPEDA MOTOR Tahun 1991, WARISAN Rp. 1.600.000
2. MOBIL, TOYOTA FORTUNER 2.4 VRZ 4X2 Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 410.000.000
3. MOBIL, TOYOTA COROLLA CROSS 1.0 / MINIBUS Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp. 515.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 2.530.000.000

D. SURAT BERTHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 1.019.131.481

F. HARTA LAINNYA Rp. ----



Sub Total	Rp.	6.800.731.481
III. HUTANG	Rp.	----
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	6.800.731.481

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.